

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini akan dibahas tentang teori yang akan mendasari dari penelitian ini. Tinjauan pustaka dalam bab ini akan mencantumkan studi empiris yang pernah dilakukan sebelumnya.

#### **2.1. Kemiskinan**

Pada penelitian ini akan dibahas tentang tentang kemiskinan dan hal apa saja yang berkaitan dengan kemiskinan. Hal-hal yang berkaitan tersebut meliputi teori kemiskinan, definisi kemiskinan, jenis-jenis kemiskinan, ciri penduduk miskin, indikator kemiskinan, penyebab kemiskinan, dan strategi kebijakan pengentasan kemiskinan.

##### **2.1.1. Teori Kemiskinan**

Membahas permasalahan kemiskinan tidak terlepas dengan teori-teori yang biasa menjelaskan permasalahan ini. Menurut teori Michael Sherraden kemiskinan dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

###### **1. Teori Budaya Miskin (*culture of poverty*)**

Teori ini dijelaskan oleh Oscar Lewis berpendapat bahwa orang miskin akan tetap miskin karena mereka belajar perilaku orang miskin dimana mereka belajar untuk malas bekerja, boros, tidak visioner, dan ia juga berkata bahwa

kemiskinan diturunkan generasi ke generasi berikutnya karena anak diajarkan dengan nilai-nilai dan tujuan kemiskinan. Hal ini bermakna setiap individu yang tinggal di lingkungan miskin tidak merasakan kemiskinan yang diderita. Situasi ini mengindikasikan bahwa mereka merasa nyaman dengan kondisinya saat ini dan tidak ingin memperbaiki kehidupannya walaupun bagi pemerintah kondisi miskin adalah suatu hal yang harus segera disejahterakan.

## 2. Teori Struktural

Teori ini menyatakan bahwa kemiskinan diakibatkan oleh tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat karena lebih mempertahankan kemiskinan dan tidak mendapatkan akses dalam pengambilan keputusan. Menurut Marx, kelompok miskin memiliki kualitas hidup yang buruk karena hanya adanya eksploitasi dari kaum kapitalis dan pekerja mengalami keterasingan dari produk yang dihasilkan, dari sesama manusia, dan terasing dari proses produksinya.

## 3. Teori Individu (*human behavior*)

Teori ini membahas tentang perilaku manusia membuat pilihan, motivasi, sikap, dan *human capital*. Teori yang mengacu pada teori ekonomi klasik ini juga mengatakan bahwa kemiskinan terjadi karena ketidakmampuan individu dalam menyikapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kepercayaan pada individualisme menyebabkan tingginya perilaku kerja keras pada individu dan rasa tanggung jawab untuk memperoleh kebutuhan dasar. Jadi, manusia sendirilah yang menentukan apakah ia memilih untuk lepas dari kemiskinan atau bertahan dalam kondisi tersebut.

### 2.1.2. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu fenomena atau kenyataan yang belum dan tidak akan pernah terhapuskan dari muka bumi ini. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan dan perbedaan sumberdaya. Kemiskinan tidak mudah untuk didefinisikan. Berbagai konsep, makna, dan metode pengukuran telah diungkapkan di banyak kalangan. Perbedaan cara pandang ini pada akhirnya menjadi berkah, karena program penanggulangan kemiskinan yang terbaik didasarkan pada konsep kemiskinan yang dialami oleh masyarakat itu sendiri.

Kemiskinan dapat dilihat dari standar hidup layak, yang artinya kita melihat apakah seseorang atau surat keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Selanjutnya diartikan kemiskinan merupakan kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar, sehingga tidak tercapainya taraf hidup yang layak. Kebutuhan dasar yang dimaksud misalnya pakaian, makanan, tempat berlindung atau rumah, kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan semacam ini biasa disebut kemiskinan absolut (Maipita, 2014).

Definisi kemiskinan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain:

1. Kemiskinan menurut standar hidup layak. Kelompok ini berpendapat bahwa kemiskinan terjadi karena kebutuhan pokok tidak terpenuhi. Dengan kata lain, seseorang atau suatu rumah tangga tidak mampu maka dia dikatakan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan standar hidup layak. Kemiskinan semacam ini disebut juga dengan kemiskinan absolut.

2. Kemiskinan menurut tingkat pendapatan. Pandangan ini berpendapat bahwa kemiskinan terjadi karena kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang layak.

Kriteria tentang penduduk miskin berkenaan dengan penerapan Program Pengembangan Kecamatan (PKK) menurut versi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menyatakan bahwa penduduk miskin paling tidak memenuhi enam kriteria sebagai berikut:

1. Rumah layak huni
  - a. Milik sendiri
  - b. Bukan milik sendiri.
2. Akses air bersih dan sanitasi.
3. Pendapatan dan pengeluaran.
4. Kepemilikan aset.
5. Frekuensi makan (lebih dari 2 kali sehari) dan kualitas gizi makanan.
6. Dalam setahun dapat membeli minimal 1 stel pakaian baru.

Dari enam kategori tersebut, jika terdapat tiga kategori atau lebih maka suatu keluarga dapat dikategorikan miskin. Oleh sebab itu, komitmen dan konsisten dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dengan cara yang adil tanpa membeda-bedakan masyarakat miskin akan meningkatkan keselarasan sosial dengan politik dengan dasar hak-hak asasi manusia.

Menurut BPS (2016) dalam buku Tulus T. H. Tambunan (2018), ada beberapa pendekatan untuk menentukan kriteria kemiskinan diantaranya sebagai berikut:

1. Pendekatan dasar (nilai pengeluaran konsumsi minimum) yang dibutuhkan untuk membeli makanan dan non-makanan seperti kesehatan, pendidikan, rumah, pakaian, dan transportasi.
2. Pendekatan non-moneter seperti luas dan jenis lantai rumah tinggal, ketersediaan air bersih, jenis jamban, dan kepemilikan aset.
3. Pendekatan keluarga sejahtera, misalnya apakah semua anggota keluarga makan dua kali atau lebih per hari, mempunyai pakaian yang berbeda seperti di rumah, atau sekolah.
4. Pendekatan pengeluaran atau pendekatan minimum dalam nilai Dolar AS (untuk membuat perbandingan antar negara).

Menurut Diah dalam Bank Dunia (2007), menguraikan tentang penyebab terjadinya kemiskinan diantaranya sebagai berikut:

1. Kegagalan dalam kepemilikan tanah dan modal.
2. Ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana yang terbatas.
3. Kebijakan dalam pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor.
4. Adanya kesempatan yang berbeda antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung.
5. Perbedaan sumber daya manusia (SDM) dan perbedaan antara sektor ekonomi tradisional dan ekonomi modern yang rendah dalam masyarakat.
6. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya alam (SDA) dan lingkungannya.
7. Tata pemerintahan tidak bersih dan baik (*good governance*).

8. Pengelolaan sumber daya alam yang begitu berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Namun indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah terbatasnya kepemilikan tanah dan modal, sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat terbatas, pembangunan yang bias kota, kesempatan yang berbeda antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lain, produktivitas rendah, budaya hidup yang kurang baik, tata pemerintahan buruk, dan sumber daya alam dengan pengelolaan yang berlebihan.

Kemiskinan juga diartikan sebagai sejauh mana suatu individu berada dibawah standar hidup minimal yang dapat diterima oleh masyarakat. Maipita mengutip Marianti dan Munawar (2006) menyatakan bahwa kemiskinan adalah sebuah fenomena multidimensi, didefinisikan dan diukur dalam banyak cara. Dalam banyak kasus, terminologi kesejahteraan ekonomi digunakan untuk mengukur kemiskinan, misalnya pendapatan dan konsumsi. Seseorang dikatakan miskin apabila ia berada dibawah tingkat kesejahteraan minimum tertentu yang telah disepakati.

### **2.1.3. Jenis Kemiskinan**

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga ada banyak faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan, antara lain: kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan

menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Menurut Suryawati (2005) kemiskinan dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Kemiskinan absolut, dipandang dari sisi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar minimum yaitu dimana kondisi seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang dibutuhkan untuk bisa bekerja dan hidup.
2. Kemiskinan relatif, diperoleh dengan membandingkan kelompok masyarakat yang pendapatan terendah dengan kelompok masyarakat berpendapatan tertinggi (kelompok bawah dengan kelompok atas) atau dengan kata lain yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mencapai pada seluruh masyarakat, sehingga mengakibatkan ketimpangan pada pendapatan.
3. Kemiskinan kultural, mengacu pada permasalahan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya misalnya tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, tidak mau bekerja keras jadi etos kerja sangat rendah, pemboros, tidak disiplin, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural, disebabkan oleh tatanan kelembagaan dan sistem yang diterapkan, misalnya sistem politik, keamanan, ekonomi, dan lainnya karena

kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi rendah (*underdevelopment trap*) atau tidak mungkin sejahtera.

Kemiskinan juga dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu pertama kemiskinan alamiah, lebih banyak disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berhubungan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus. Kedua kemiskinan buatan, lebih banyak disebabkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mampu menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata.

#### **2.1.4. Ciri Penduduk Miskin**

Kelompok penduduk miskin yang berada pada masyarakat pedesaan dan perkotaan pada umumnya digolongkan pada buruh tani, pedagang kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, pengemis, pengamen dan pengangguran (Suryawati, 2005).

Menurut Salim (1967) ciri-ciri penduduk miskin yaitu:

1. Rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri misalnya, tanah, modal peralatan kerja, dan keterampilan.
2. Mempunyai tingkat pendidikan yang rendah.
3. Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja).
4. Kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (*slum area*).



5. Kurangnya kesempatan untuk memperoleh misalnya bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, angkutan, fasilitas komunikasi, dan kesejahteraan sosial lainnya dalam jumlah yang cukup.

### **2.1.5. Indikator Kemiskinan**

Tinggi rendahnya kemiskinan disuatu wilayah bisa diketahui dengan memakai sejumlah alat ukur yang biasanya disebut sebagai indikator-indikator kemiskinan. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan indikator antara perdesaan dan perkotaan, kecuali pada kehidupan perkotaan yang tidak berada di perdesaan. Tetapi di negara-negara maju, kehidupan masyarakat di perdesaan termasuk bentuk kegiatan ekonominya telah meningkat dan tidak ada lagi perbedaan yang signifikan antara perdesaan dan perkotaan. Menurut Tambunan ciri-ciri yang dimaksudkan adalah misalnya kendaraan pribadi, merek dan umur kendaraan, atau akses ke rumah sakit. Indikator-indikator utama kemiskinan adalah sebagai berikut:

#### **1. Pendapatan/Konsumsi per Minggu/Bulan/Tahun**

Indikator paling umum digunakan untuk mengukur apakah seseorang itu miskin atau tidak adalah jumlah pendapatan dari hasil kerja atau usaha rata-rata per minggu, atau per bulan atau per tahun.

#### **2. Aset**

Jumlah atau nilai aset, seperti tanah, rumah/gedung, dan aset-aset lainnya yang bergerak juga bisa digunakan sebagai salah satu indikator kemiskinan.

### 3. Total Kekayaan

Jumlah kekayaan seseorang atau keluarga adalah per definisi jumlah dari semua aset yang dimiliki orang itu ditambah dengan jumlah pendapatan yang didapatnya dari segala sumber, termasuk sebagai pekerja atau pegawai.

### 4. Makanan yang dikonsumsi

Menyoroti makanan sebagai salah satu indikator kemiskinan terutama melihat pada dua hal, yakni porsi dan kualitas dari makanan yang dikonsumsi. Orang miskin lebih banyak memakai pendapatannya untuk konsumsi makanan dari pada untuk non makanan, misalnya pakaian, sepatu, alat-alat elektronik atau kendaraan. Indikator yang umum digunakan untuk mengukur kecukupan makanan tidak hanya dalam volume tetapi juga kandungan/asupan energi misalnya, kalori, gizi, dan protein.

### 5. Tempat Tinggal

Tempat tinggal bisa dalam arti rumah dan lokasi dimana rumah itu berada. Dalam hal tempat tinggal, bentuk dan kualitasnya bisa digunakan sebagai salah satu indikator.

### 6. Pendidikan Formal

Pendidikan formal merupakan aspek penting dari kemiskinan. Indikator kemiskinan dari aspek pendidikan seperti, angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun keatas, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas, angka partisipasi sekolah, jumlah anak yang terdaftar disekolah atau indeks pembangunan manusia (IPM).

## 7. Infrastruktur Dasar Rumah Tangga

Indikator infrastruktur dasar rumah tangga ini berupa air bersih, sanitasi layak, listrik yang cukup, telekomunikasi dan transportasi yang baik.

## 8. Kesehatan

Seperti halnya pendidikan, kesehatan juga dilihat sebagai salah satu aspek penting dari kemiskinan dan oleh sebab itu, dianggap sebagai salah satu indikator penting untuk menggambarkan kemiskinan di suatu wilayah/masyarakat. Dua komponen penting aspek kesehatan yang harus diukur. Komponen pertama adalah akses ke pelayanan kesehatan yang layak/baik dan komponen kedua adalah kondisi kesehatan rata-rata masyarakat.

Menurut Arsyad (2015), ada beberapa macam ukuran yang seringkali digunakan sebagai indikator kemiskinan yaitu:

### 1. Tingkat Konsumsi Beras

Sajogyo (1977) menggunakan tingkat konsumsi beras per kapita sebagai salah satu indikator kemiskinan. Daerah perdesaan, penduduk dengan konsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun dapat dikelompokkan sebagai penduduk miskin. Sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 360 kg per kapita per tahun.

### 2. Tingkat Pendapatan

Kenaikan batas garis kemiskinan disebabkan karena semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Penduduk di daerah perkotaan memiliki kebutuhan yang cenderung sangat beragam

dibandingkan dengan penduduk didaerah pedesaan, sehingga mempengaruhi pola pengeluaran mereka.

### 3. Indikator Kesejahteraan Rakyat

Pada salah satu publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1961 yang berjudul *International Definition and Measurement of Levels of Living: An Interim Guide* dijelaskan bahwa ada sembilan komponen kesejahteraan, antara lain: kesehatan, konsumsi, makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan.

### 4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia banyak memiliki kemiripan dengan indeks pembangunan manusia (*Human Development Index*). Menurut UNDP (*United Nations Development Program*), ada tiga nilai pokok dalam menentukan tingkat kemiskinan yaitu:

#### a. Tingkat Kehidupan

Bahwa dengan tingkat kesehatan yang begitu rendah, sehingga lebih dari 30 persen penduduk-penduduk negara terbelakang tidak mungkin bisa hidup lebih dari 40 tahun.

#### b. Tingkat Pendidikan Dasar

Diukur dengan persentase penduduk usia dewasa yang buta huruf, dengan beberapa penekanan tertentu, seperti hilangnya hak pendidikan pada kaum wanita.

c. Tingkat Kemampuan Ekonomi

Nilai pokok ini diukur dengan persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap prasarana kesehatan dan air bersih, serta persentase anak-anak di bawah usia lima tahun yang kekurangan gizi.

### 2.1.6. Faktor Penyebab Kemiskinan

Faktor penyebab kemiskinan dalam laporan *Era Baru dalam Pengentasan di Indonesia* pada tahun 2007 dan dipublikasikan oleh *World Bank* sebagai berikut:

1. Pendidikan

Kemiskinan memiliki kaitan yang sangat erat dengan pendidikan. Pencapaian jenjang pendidikan yang lebih tinggi berkaitan dengan konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi pula. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga di daerah perkotaan mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga di daerah perdesaan untuk setiap tambahan tahun pendidikan.

2. Pekerjaan

Bekerja di sektor pertanian memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan. Rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian memiliki tingkat konsumsi yang lebih rendah dibandingkan rumah tangga yang bekerja di sektor lain. Sedikitnya penduduk miskin yang bekerja di sektor formal dan sektor non pertanian, kenyataannya bahwa bekerja di sektor-sektor yang lebih menguntungkan tersebut memiliki hubungan dengan pengurangan kemiskinan, maka perpindahan tenaga

kerja ke sektor pertanian formal, atau ke sektor non pertanian formal maupun informal akan membuka jalan keluar dari kemiskinan.

### 3. Gender

Rumah tangga dengan kepala keluarga laki-laki jauh lebih beruntung dibandingkan dengan rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan. Namun kenyataannya tidaklah demikian, meskipun tingkat kemiskinan sedikit lebih rendah pada rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan. Penilaian terhadap resiko dan kerentanan di antara beberapa tipe rumah tangga yang berbeda mengindikasikan bahwa rumah tangga miskin dengan kepala keluarga perempuan memiliki resiko yang lebih besar untuk mengalami guncangan negatif akibat konflik, masalah kesehatan dan resiko ekonomi.

### 4. Akses terhadap pelayanan dan infrastruktur dasar

- a. Kemiskinan jelas berkaitan dengan rendahnya akses terhadap fasilitas dan infrastruktur dasar.
- b. Rumah tangga di daerah perdesaan yang memiliki akses lebih banyak akses kepada pendidikan sekolah menengah dalam jarak yang cukup terjangkau. Sedangkan di daerah perkotaan dengan kenaikan tingkat konsumsi jauh lebih rendah di daerah perkotaan diakibatkan oleh faktor keuntungan yang berkurang karena pada umumnya memiliki jumlah sekolah menengah yang lebih tinggi. Investasi lebih lanjut bidang pendidikan di daerah perdesaan sebaliknya lebih ditekankan pada peningkatan kualitas guru dan manajemen sekolah, bukan pada pembangunan gedung sekolah baru.

- c. Akses kursus informal di daerah perdesaan sebesar 1 persen sedangkan di daerah perkotaan sebesar 7,1 persen, tidak mengherankan karena permintaan akan keterampilan teknis yang berkaitan dengan alat (komputer dan mesin) lebih tinggi di daerah perkotaan. Akses informal dapat menjadi kunci dalam mobilitas ekonomi keatas.
- d. Akses lembaga pengkreditan setempat juga menaikkan secara berarti tingkat pengeluaran dan mengurangi kemungkinan rumah tangga untuk menjadi miskin.
- e. Akses jalan memiliki hubungan dengan tingkat konsumsi yang lebih tinggi.
- f. Akses telekomunikasi.
- g. Lokasi geografis.

#### **2.1.7. Penyebab Kemiskinan**

Seperti yang telah diutarakan pada beberapa bagian terdahulu, bahwa kemiskinan adalah suatu kajian yang menarik banyak kalangan. Oleh sebab itu, pengertian, definisi, penyebab, dampak, metode pengukuran dan cara pandangnya pun berbeda sesuai dengan pendapatan. Isdjoyo (2010), membedakan pendapat kemiskinan di daerah perdesaan dan di daerah perkotaan. Kemiskinan di daerah perdesaan yang utama disebabkan oleh faktor-faktor antara lain:

##### **1. Ketidakberdayaan**

Ketidakberdayaan ini timbul karena kurangnya lapangan kerja, rendahnya harga pokok yang dihasilkan mereka, dan tingginya biaya pendidikan.

## 2. Keterkucilan

Keterkucilan ini timbul karena rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, sulitnya sarana transportasi, serta ketidakadilan akses terhadap kredit menyebabkan mereka terkucilkan dan menjadi miskin.

## 3. Kemiskinan Materi

Kemiskinan materi ini timbul karena kurangnya modal, dan minimnya lahan pertanian yang dimiliki menyebabkan penghasilan yang relatif rendah.

## 4. Kerentanan

Kerentanan ini timbul karena sulitnya mendapatkan pekerjaan, pekerjaan musiman, dan bencana alam, membuat mereka rentan dan menjadi miskin.

## 5. Sikap

Sikap yang menerima apa adanya dan kurang termotivasi untuk bekerja keras membuat mereka menjadi miskin.

Kemiskinan di daerah perkotaan pada dasarnya diakibatkan oleh faktor-faktor yang sama dengan di daerah perdesaan, yang berbeda adalah penyebab dari faktor-faktor tersebut, misalnya faktor ketidakberdayaan di daerah perkotaan cenderung disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan, dan tingginya biaya hidup.

### **2.1.8. Strategi/Kebijakan Pengentasan Kemiskinan**

Strategi atau kebijakan pengentasan kemiskinan menurut Arsyad (2015) sebagai berikut:



## 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Perbaikan akses terhadap pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi angka kemiskinan. Ada tiga faktor utama yang mendasari kebijakan ini, yaitu:

- a. Berkurangnya beban penderitaan secara langsung dapat memuaskan kebutuhan atas konsumsi barang-barang pokok.
- b. Perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin.
- c. Penurunan tingkat kematian bayi dan anak-anak secara langsung juga berperan dalam mengurangi kemiskinan.

Pelayanan-pelayanan pokok, seperti listrik dan air bersih, perumahan yang layak huni, sarana kesehatan yang baik, dan lain sebagainya cukup penting bagi golongan miskin. Tanpa adanya perbaikan akses golongan miskin terhadap pelayanan-pelayanan pokok tersebut, maka efektifitas setiap pelayanan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan dapat terganggu.

## 2. Pembangunan Pertanian dan Perdesaan

Munculnya rezim orde baru dua pertiga penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian dan Indonesia sebagai negara pengimpor beras terbesar di dunia. Pembangunan sektor ini telah menampakkan hasilnya, namun kenyataannya kesejahteraan petani belum bergerak pada posisi semula. Hal ini disebabkan oleh nilai jual produk pertanian di pasaran sangat rendah, yang mengakibatkan kerugian bagi para petani yang merupakan profesi mayoritas penduduk Indonesia. Ada tiga

aspek dari pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi di Indonesia, yaitu:

- a. Revolusi teknologi dalam pertanian padi termasuk pembangunan irigasi.
- b. Program pemerintah untuk meningkatkan produksi tanaman keras, seperti karet, kelapa dan kelapa sawit di daerah luar Jawa.
- c. Pembangunan pertanian di daerah-daerah transmigrasi.

## **2.2. Pengangguran**

Dalam sub bab ini akan dibahas tentang pengangguran dan hal apa saja yang mendasari pokok pembahasan yang akan diamati. Hal-hal yang berkaitan tersebut meliputi teori pengangguran, definisi pengangguran, jenis-jenis pengangguran, pengangguran terbuka, faktor penyebab pengangguran, dan kebijakan mengurangi pengangguran.

### **2.2.1. Teori Pengangguran**

Ada beberapa teori yang menjelaskan pengangguran di Indonesia, yaitu:

#### **1. Teori Klasik**

Teori klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga pasar, sehingga dapat menjamin terbentuknya permintaan yang dapat menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran disebabkan oleh mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara, karena dapat diatasi melalui mekanisme harga (Gilarso, 2004).

Jadi dalam teori klasik, jika tenaga kerja terlalu banyak maka upah akan turun yang akan mengakibatkan produksi perusahaan menurun. Oleh sebab itu, permintaan tenaga kerja akan terus meingkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Jika harga relatif stabil, peningkatan tenaga kerja akan mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar (Tohar, 2000).

## 2. Teori Keynes

Teori Keynes dalam menanggapi masalah pengangguran mengatakan hal yang berlawanan dengan teori klasik. Teori Keynes mengatakan masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi konsumsi yang rendah. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dialihkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja bertambah, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti daya beli masyarakat akan barang berkurang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak bisa menyerap tenaga kerja.

Keynes menyarankan adanya campur tangan pemerintah untuk mempertahankan tingkat permintaan agregat sehingga sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja (Soesastro dkk, 2005). Perlu ditekankan bahwa pemerintah hanya bertanggung jawab untuk menjaga tingkat permintaan agregat dan penyedia lapangan kerja adalah sektor pariwisata. Tujuannya untuk mempertahankan pendapatan masyarakat sehingga daya beli masyarakat terjaga.

Dengan cara ini, tidak akan memperburuk resesi serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi.

### 3. Teori Kependudukan dari Malthus

Teori kependudukan dari Malthus menjelaskan bahwa penduduk cenderung melebihi pertumbuhan persediaan makanan. Dalam esainya Malthus menyajikan idenya dalam bentuk yang cukup kaku. Malthus mengatakan penduduk cenderung tumbuh secara “deret ukur” (misalnya, dalam lambang 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya), sementara persediaan makanan cenderung tumbuh secara “deret hitung” (misalnya, dalam deret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya). Dalam karyanya Malthus menekankan bahwa penduduk cenderung tumbuh secara tidak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan. Hal ini menyimpulkan bahwa kuantitas manusia akan terpengaruh ke dalam kemiskinan kelaparan. Tidak ada kemajuan teknologi yang mampu mengalihkan keadaan karena kenaikan penawaran makanan terbatas sedangkan pertumbuhan penduduk tak terbatas dan bumi tidak mampu memproduksi makanan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dalam jangka panjang.

Apabila dianalisis lebih dalam Malthus menyatakan penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan, persaingan ini akan membuat sebagian manusia yang tersisih serta tidak mampu lagi mendapatkan bahan makanan. Pada masyarakat modern diartikan bahwa semakin tingginya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang

ada. Karena jumlah kesempatan yang rendah maka manusia akan saling bersaing untuk memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan akan menjadi golongan pengangguran.

#### 4. Teori Sosiologi Ekonomi No-Marxian

Pada awal abad 20 Marx menganalisis tentang struktur dan proses ekonomi yang dapat dibayangkan sebagai sistem kapitalisme kompetitif. Pada zaman itu industri kapitalis tergolong masih kecil dan belum ada satupun yang memegang perekonomian dan mengendalikan pasar. Marx yakin suatu saat apabila kapitalisme sudah muncul dengan demikian cepatnya maka akan menimbulkan kompetisi antar industri yang menjadi semakin pesat dan kemudian akan menghasilkan sistem monopoli dari industri yang paling kuat dalam persaingan tersebut. Dengan munculnya sistem monopoli, maka akan ada satu perusahaan besar yang akan mengendalikan perusahaan-perusahaan lain dalam perekonomian kapitalis.

Pengembangan analisis Marx yang dianut oleh para Marxian yang baru konsep “konsep buruh”. Konsep ini tidak mendeskripsikan sekelompok orang atau pekerjaan tertentu, namun lebih merupakan pembelian dan penjualan tenaga kerja. Tenaga kerja tidak memiliki alat produksi sama sekali sehingga segolongan orang terpaksa menjual tenaga mereka kepada sebagian kecil orang yang mempunyai alat produksi.

Dengan demikian maka dapat ditelaah bahwa dengan adanya pergantian sistem kapitalis kompetitif menjadi sistem kapitalis monopoli, maka akan terdapat

sebagian perusahaan yang tidak mampu bersaing dan menjadi terpuruk. Apabila semua proses produksi dan pemasaran semua terpengaruh oleh sebuah perusahaan besar saja, maka akan menghasilkan perusahaan kecil semakin sulit lalu tidak mampu lagi menggaji pekerjanya, hal pemasaran, maka perusahaan itu tidak bisa beroperasi lagi, para pekerja yang semula bekerja dalam perusahaan tersebut menjadi tidak mempunyai pekerjaan lagi. Akhirnya pekerja menjadi pengangguran.

### **2.2.2. Definisi Pengangguran**

Istilah pengangguran selalu dikaitkan dengan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk berusia antara 15 tahun sampai 65 tahun, mempunyai kemampuan untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Walaupun demikian tidak semua yang berusia 15 tahun sampai 65 tahun termasuk angkatan kerja, karena tidak mau bekerja. Contohnya orang yang tidak memerlukan lagi pekerjaan karena sudah memiliki kekayaan yang melimpah, ibu-ibu rumah tangga, dan orang yang masih bersekolah atau kuliah.

Dengan demikian yang disebut dengan angkatan kerja dapat digolongkan sebagai berikut:

#### **1. Bekerja (*employment*)**

Golongan ini merupakan semua orang yang mempunyai pekerjaan dan bekerja apa saja sehingga memperoleh penghasilan.

## 2. Tidak bekerja (*unemployment*)

Golongan ini merupakan seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan, tetapi sedang berusaha mencari pekerjaan.

Definisi pengangguran menurut penelitian ini adalah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Lalu pengangguran terbuka adalah pengangguran sukarela, atau sengaja sedang menganggur unuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Seseorang baru dikatakan menganggur apabila mereka ingin dan telah berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak mendapatkannya.

Dalam ilmu kependudukan (demografi), orang yang mencari kerja masuk dalam kelompok penduduk yang disebut dengan angkatan kerja. Berdasarkan kategori usia, usia angkatan kerja adalah usia 15 tahun sampai 64 tahun. Tetapi tidak semua yang berusia 15 tahun sampai 64 tahun dihitung sebagai angkatan kerja.

### **2.2.3. Jenis-Jenis Pengangguran**

Berdasarkan faktor-faktor yang menimbulkannya, pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga jenis: pengangguran konjungtur, pengangguran struktural, pengangguran normal atau pengangguran friksional. Ketiga jenis pengangguran ini dikelompokkan sebagai pengangguran terbuka, yaitu dalam periode dimana tenaga kerja menganggur mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan.

### 1. Pengangguran Konjungtur (*cyclical unemployment*)

Pengangguran konjungtur merupakan pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi.

### 2. Pengangguran Struktural

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi selalu diikuti oleh perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dalam jangka panjang perkembangan perekonomian misalnya, akan meningkatkan peranan sektor industri pengolahan dan mengurangi kegiatan pertambangan dan pertanian. Industri-industri rumah tangga dan industri-industri kecil juga akan mengalami kemunduran dan digantikan oleh kegiatan industri yang menghasilkan barang yang sama tetapi dengan menggunakan peralatan yang canggih. Kegiatan ekonomi dan perubahan struktur sebagai akibat perkembangan ekonomi dapat mengakibatkan masalah pengangguran yang dinamakan pengangguran struktural.

### 3. Pengangguran Normal atau Friksional

Jika dalam suatu periode tertentu perekonomian terus menerus akan mengalami perkembangan yang cepat jumlah dan tingkat pengangguran akan menjadi semakin rendah. Pada akhirnya perekonomian dapat mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, yaitu jika pengangguran tidak melebihi 4 persen pengangguran yang berlaku dinamakan pengangguran normal.

Jenis pengangguran yang lain adalah setengah menganggur (*underemployment*), yaitu mereka yang bekerja lebih sedikit dari pada yang mereka



inginkan. *Underemployment* ini bisa berupa dua bentuk. Pertama, para pekerja yang terpaksa bekerja dalam jam yang singkat sebagai alternatif dari pada tidak bekerja (*visible underemployment*), seperti sopir yang bekerja 4 hari seminggu sehingga harus bergantian (*shift*) dengan temannya. Kedua, mereka yang terpaksa bekerja dalam bidang.

#### **2.2.4. Pengangguran Terbuka**

Pengangguran terbuka adalah mereka baik secara sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau namun tidak memperoleh pekerjaan), Edward (1997) dalam (Arsyad, 2010:359).

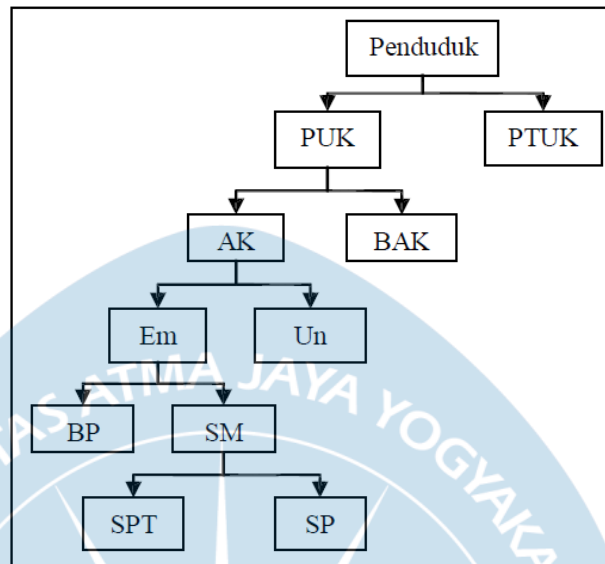
Dampak pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran dari pasar tenaga kerja, menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk mempunyai keterkaitan yang penting bagi kesempatan kerja. Pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa disertai dengan rasio investasi yang lebih besar, mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan, meningkatkan pengangguran dan menghalangi transformasi struktural dalam angkatan kerja.

Adapun variabel-variabel yang diduga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka yaitu variabel pertumbuhan penduduk, upah minimum, dan tingkat pendidikan seperti berikut ini telah dikaji dalam hubungan dengan tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran erat hubungannya dengan perkembangan penduduk dan kesempatan kerja, jika kedua hal tersebut tidak dilakukan dengan tepat

maka munculah berbagai dampak yang buruk, baik terhadap kestabilan ekonomi maupun terhadap kestabilan politik.

Penduduk merupakan semua orang yang menempati disuatu wilayah tertentu dan terlepas dari warga negara atau bukan warga negara. Penduduk merupakan mereka yang bertempat tinggal atau berasal didalam suatu wilayah negara. Jumlah penduduk yang besar disuatu negara tidak secara otomatis akan menjadi modal pembangunan, bahkan dapat menjadi beban dan tanggungan penduduk lainnya.

Penduduk dapat dikelompokkan ke dalam 5 tingkat. Penduduk ini terbagi menjadi 2 kategori dan merupakan tingkat 2 yaitu penduduk usia kerja (PUK) dan penduduk tidak usia kerja (PTUK). Penduduk usia kerja terbagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja (AK) dan bukan angkatan kerja (BAK). Tingkat 4 dari pembagian penduduk adalah penduduk yang tergolong dalam angkatan kerja terbagi menjadi dua kategori, yaitu pengangguran (*unemploy*) dan bekerja (*employ*). Bekerja penuh (BP) dan setengah menganggur (SM) merupakan kategori dari angkatan kerja yang tergolong bekerja. Setengah menganggur dibagi menjadi 2 kategori, yaitu setengah pengangguran ketara (SPK). Pengelompokkan penduduk tersebut memperlihatkan bahwa penduduk yang merupakan angkatan kerja dan tergolong pengangguran dapat menjadi beban penduduk yang lainnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1.



**Gambar 2.1. Penduduk dan Tenaga Kerja**

Sumber: Jurnal Sains dan Seni Pomits, Vol. 3, No. 1

Keterangan Gambar 2.1:

PUK : Penduduk Usia Kerja

PTUK : Penduduk Tidak Usia Kerja

AK : Angkatan Kerja

BAK : Bukan Angkatan Kerja

Em : *Employ* (bekerja)

Un : *Unemploy* (tidak bekerja)

BP : Bekerja Penuh

SM : Setengah Menganggur

SPTK : Separuh Pengangguran Tidak Ketara

SPK : Separuh Pengangguran Terbuka.

Tingkat pengangguran diketahui dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) pada tahun 2011. Faktor usia, pendapatan rumah tangga, tingkat pendidikan, keterampilan dan pelatihan kerja mempengaruhi seseorang untuk bekerja. Penanganan pengangguran telah adalah pokok kebijaksanaan bagi negara sedang berkembang dan negara maju. *Underemployment* dan *disguised unemployment* telah bergeser ke kota dalam bentuk pengangguran terbuka. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pengangguran di kota-kota ialah:

1. Banyak tenaga yang pindah dari desa ke kota.
2. Kota tidak dapat menampung tenaga, karena kekurangan faktor produk lain (terutama kapital) untuk mengimbangi tenaga kerja yang meningkat jumlahnya itu.

Perpindahan tenaga kerja berhubungan dengan *push factors* dan *pull factors* (kekuatan yang mendorong dan menarik untuk pindah dari desa ke kota). *Push factors* berupa terbatasnya kesempatan kerja di daerah perdesaan dan keinginan untuk pindah ditunjang oleh tersedianya transportasi dan pendidikan yang lebih baik. Sedangkan *pull factors* berupa perkembangan industri di kota-kota yang menyediakan upah jauh lebih tinggi daripada di daerah perdesaan dan di daerah perkotaan memberikan jauh lebih banyak kesenangan dan hubungan dibandingkan di daerah perdesaan.

### **2.2.5. Faktor Penyebab Pengangguran**

1. Kebijakan Pemerintah yang Tidak Tepat

Cara pemerintah melakukan pelatihan tenaga kerja yang mengakibatkan langkahnya produk berskill. Situasi ini akan mendorong pengusaha untuk memilih

proses yang mekanis. Perlu diketahui bahwa salah satu faktor keberhasilan industrialisasi Asia Timur adalah tenaga kerja yang sangat padat, yaitu banyaknya uang yang diinvestasikan oleh pemerintah daerah dalam pendidikan dan pelatihan.

## 2. Distorsi Harga Faktor Produksi

Pada sektor modern memiliki upah yang tinggi. Upah yang berlaku untuk tenaga kerja tidak terampil di sektor modern di negara-negara berkembang seringkali melebihi tingkat tekanan serikat pekerja, dan perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut yang biasanya menentukan upah lebih tinggi dari tingkat upah dalam negeri.

Apabila dihitung secara kasar di seluruh negara berkembang, pendapatan per pekerja dari upah minimum resmi ternyata beberapa kali lebih tinggi daripada pendapatan per kapita negara tersebut. Ini akan mengakibatkan pengangguran yang lebih tinggi karena sejumlah studi menunjukkan bahwa tingkat upah yang tinggi akan menurunkan penyerapan tenaga kerja.

## 3. Pengangguran Penduduk Berpendidikan Tinggi

Pengangguran tenaga kerja terdidik di negara berkembang disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak sesuai dengan kurikulum yang diajarkan di bangku sekolah. Salah satu penyebabnya adalah karena kurikulum yang disusun di negara-negara berkembang tersebut cenderung ke ilmu-ilmu sosial yang lebih mudah di selenggarakan daripada ilmu-ilmu alam dan teknik yang sebenarnya lebih dibutuhkan di banyak perusahaan. Di sisi lain, para lulusan ini lebih suka memilih untuk menunggu pekerjaan yang mereka rasa cocok dengan pendidikan dan

menolak untuk bekerja di bidang lain, khususnya jika gajinya di bawah standar yang mereka inginkan.

### **2.2.6. Kebijakan Mengurangi Pengangguran**

#### **1. Kebijakan Kontrol Populasi**

Pengangguran yang tinggi di negara-negara berkembang disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan kesempatan dan pertumbuhan angkatan kerja yang cepat. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengurangi pengangguran adalah dengan melaksanakan program-program KB (keluarga berencana) dan program-program perbaikan nutrisi, kesehatan, pendidikan, distribusi, pendapatan, dan serta mendorong perempuan untuk mengurangi tingkat fertilitas dan pertumbuhan populasi dengan demikian akan mengurangi angkatan kerja berusia antara 15 sampai 20 tahun.

#### **2. Kebijakan Mengurangi Migrasi Desa-Kota**

Fakta membuktikan bahwa pengangguran di daerah perkotaan negara-negara berkembang adalah dua kali lipat di daerah perdesaan. Dengan demikian pengangguran di daerah perkotaan layak mendapatkan perhatian untuk diatasi para prioritas utama. Salah satu cara adalah dengan menurunkan migrasi desa ke kota. Hal ini bisa dilakukan dengan pembangunan yang lebih intens di daerah perdesaan.

### 3. Teknologi yang Tepat

Secara umum teknologi yang sesuai di negara-negara berkembang adalah teknologi para tenaga kerja. Penggunaan teknologi yang lebih sesuai bisa didorong dengan tindakan-tindakan dibawah ini:

- a. Memproduksi produk yang padat tenaga kerja.
- b. Mendistribusikan pendapatan yang lebih merata.
- c. Menggunakan teknologi yang tidak begitu modern.
- d. Penimbulan teknologi lokal tepat guna.

### **2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian**

Menurut Sukirno (2004:360) efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turun kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terperangkap dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Jika pengangguran di suatu negara sangat buruk maka kekacauan, politik, dan sosial selalu terjadi dalam prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan demikian untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan memberikan upah yang memadai dan menyediakan lapangan kerja bagi kelompok miskin. Peningkatan kesempatan bekerja merupakan unsur paling penting dalam strategi pembangunan yang menitikberatkan penghapusan kemiskinan.

## 2.4. Studi Terkait

Kilikili (2020), melakukan penelitian untuk menganalisis hubungan kausalitas antara tingkat pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Papua tahun 1999-2018. Alat analisis yang digunakan untuk menentukan arah hubungan kedua variabel adalah *Granger Causality Test*. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa data *time series* yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dengan periode penelitian 1999-2018. Hasil dari penelitian tidak terdapat hubungan kausalitas antara pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Papua tahun 1999-2018 ditolak.

Sinaga (2020), penelitian ini menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua tahun 2015-2019. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. Periode pengamatan menggunakan deret berkala antara tahun 2015-2019. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel (*pooling data*). Pengolahan data dengan menggunakan *software Eviews 10*. Hasil dari penelitian ini indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua tahun 2015-2019, laju PDRB tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua tahun 2015-2019, tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua tahun 2015-2019.

Cachi dan Sukamto (2014), melakukan penelitian untuk menganalisis kausalitas antara tingkat pendidikan perempuan dan produk domestik regional bruto



per kapita di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1995-2012. Alat analisis yang digunakan adalah uji kausalitas Granger (*Granger Causality Test*) dengan tujuan untuk melihat hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat (kausalitas). Jenis data adalah runtut waktu (1995-2012). Hasil penelitian ini dengan uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa antara jumlah perempuan dengan tingkat pendidikan akhir DIPLOMA I-III dengan PDRB di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki hubungan kausalitas. Begitu pula hubungan antara jumlah perempuan dengan tingkat pendidikan akhir universitas dengan PDRB per kapita dengan jumlah perempuan dengan pendidikan akhir DIPLOMA I-III memiliki hubungan satu arah untuk periode pengamatan dari tahun 1995 sampai dengan 2012.

Bolang (2017), penelitian ini menganalisis kausalitas investasi asing langsung dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1981-2015 dengan pendekatan *Granger Causality Test*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder *time series* tahunan periode 1981-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Produk Domestik Bruto (PDB) dan data Investasi Asing Langsung, data ini di peroleh dari *Website World Bank* melalui situs Indodapoer. Hasil pengujian kausalitas menggunakan *Granger Causality Test* dan langkah – langkah pengujian *Error Correlation Model* (ECM) yang meliputi pengujian akar – akar unit, pengujian derajat integrasi, dan uji kointegrasi. Langkah selanjutnya akan dilakukan pengujian ECM setelah beberapa tahapan pengujian terpenuhi serta dilakukan pengujian perubahan model regresi menggunakan *Chow Breakpoint Test*. Hasil analisis dari pengujian analisis kausalitas Granger mengenai kausalitas dua

arah, namun hanya terjadi hubungan satu arah yaitu pertumbuhan ekonomi mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia dan tidak sebaliknya.

Putra dan Arka (2018), penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis tingkat pengangguran terbuka, kesempatan kerja, dan tingkat pendidikan secara simultan dan parsial terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2011-2016. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari data tingkat penganggura terbuka, data rata – rata lama sekolah di Provinsi Bali, data penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di Provinsi Bali, serta tingkat kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2011 sampai dengan 2016. Teknik yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Hasibuan (2018), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara Tahun 2000-2016 yang menggunakan data kuantitatif, karena data yang digunakan berupa angka. Data kuantitatif terdiri dari dua variabel, yaitu variabel terikat (*Dependent*) dan variabel bebas (*Independent*). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan korelasional, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan antar variabel bebas dan variabel

terikat. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat asosiasi antar variabel dan membuat prediksi atau perkiraan berdasarkan korelasi antar variabel. Objek penelitian adalah data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu data PDRB, pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis *Vector Autoregression* (VAR) dengan menggunakan *Software Eviews 8*. Data yang digunakan *time series* dengan jumlah sampel 16 tahun, yaitu dari tahun 2000 sampai 2016. Pembentukan model VAR diawali dengan uji stasioneritas data, penentuan lag optimal, uji kointegrasi, uji kausalitas Granger, uji IRF, dan uji VD. Hasil analisis penelitian berdasarkan *variance decomposition* menunjukkan bahwa PDRB memberikan kontribusi dalam mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Utara sebesar -0,34 persen, pendidikan memberikan kontribusi dalam mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Utara sebesar 25 persen dan pengangguran memberikan kontribusi dalam mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Utara sebesar 3,14 persen. PDRB, pendidikan dan pengangguran memberikan kontribusi dalam mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Utara sebesar 51 persen.

Ningrum (2017), melakukan penelitian dengan tujuan menguji dan menganalisis tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011-2015. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Penelitian ini menggunakan model data panel dan menggunakan *Software Eviews 9*. Hasil dari penelitian tingkat pengangguran terbuka positif dan

signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,073014 yang berarti bahwa setiap kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1 persen dapat meningkatkan kemiskinan sebesar 0,073014 persen begitu juga sebaliknya. Indeks pembangunan manusia negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien indeks pembangunan manusia sebesar 0,865177, setiap peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 1 persen dapat mengurangi kemiskinan sebesar 0,865177 persen dan begitu juga sebaliknya. Upah minimum positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien upah minimum sebesar  $1.33E-06$ , setiap kenaikan upah minimum sebesar 1 juta rupiah maka dapat meningkatkan kemiskinan sebesar  $1.33E-06$  juta rupiah dan begitu juga sebaliknya.

Akhmad (2020), penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kausalitas kemiskinan, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data panel 24 kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2018. Data didapatkan dari BPS (Badan Pusat Statistik) kabupaten atau kota dan Provinsi Sulawesi Selatan. Gujarati (2003), metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Vector Autoregression* (VAR), untuk melihat hubungan timbal balik antar variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Akhmad et al (2019), menyatakan bahwa terdapat kelebihan metode VAR di banding metode lainnya, yaitu:

Lebih sederhana karena tidak perlu memisahkan variabel bebas dan terikat.

1. Model estimasi yang digunakan sederhana menggunakan metode OLS.
2. Hasil estimasi lebih baik dibandingkan metode lain yang lebih rumit.

Widarjono (2007), hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa guncangan kenaikan pertumbuhan ekonomi berdampak negatif terhadap angka kemiskinan dan pengangguran dalam jangka panjang. Selanjutnya guncangan angka pengangguran berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi tidak terjadi dalam jangka panjang. Selanjutnya guncangan angka pengangguran berdampak positif terhadap angka kemiskinan baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Selanjutnya guncangan terhadap angka kemiskinan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek akan secara perlahan pertumbuhan ekonomi akan kembali ke titik keseimbangan dalam jangka panjang. Pada sisi lain guncangan terhadap angka kemiskinan berdampak positif terhadap angka pengangguran pada jangka pendek tetapi secara perlahan akan kembali pada titik keseimbangan dalam jangka panjang.